

**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



RENCANA KERJA



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021. Dokumen Renja ini disusun sebagai proses penyempurnaan dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 merupakan tahapan kelima dari 6 (enam) tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebelum tahapan terakhir yakni penetapan Renja PD oleh Kepala Daerah.

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami sadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik berkenaan dengan substansi maupun penyajian dokumen ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan dokumen rancangan akhir Renja BKPSDMD lebih baik.

Pangkalpinang, 2020

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. SAHIRMAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610815 199103 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	II-1
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.....	II-9
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.....	II-10
2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.....	II-11
2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.....	II-13
2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra BKPSDMD.....	II-14

2.1.6.	Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi.....	II-15
		II-16
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD.....	
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD.....	II-22
2.3.1.	Sinergi Program Pusat dan Daerah.....	II-22
2.3.2.	Permasalahan dan Hambatan.....	II-23
2.3.3.	Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.....	II-24
2.3.4.	Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan BKPSDMD.....	II-25
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-36
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD.....	III-1
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional...	III-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDMD.....	III-2
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDMD	IV-1
4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	IV-1
4.2	Pendanaan.....	IV-4
BAB V	PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan Pencapaian Renstra BKPSDMD s.d. Tahun 2020.....	II-2
Tabel 2.2 Jumlah ASN BKPSDMD Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin pertanggal 31 Desember 2019.....	II-18
Tabel 2.3 Jumlah ASN BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan pertanggal 31 Desember 2019.....	II-19
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BKPSDMD....	II-19
Tabel 2.5 Formulasi Penghitungan Capaian Realisasi Target IKU.....	II-20
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD.....	II-21
Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2021.....	II-26
Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	II-37
Tabel 3.1 Rencana Kinerja Tahunan BKPSDMD Tahun 2021.....	III-4
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	IV-5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja.....	I-3
Gambar 1.2 Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	I-4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-17

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam tatanan pemerintahan, sistem perencanaan pembangunan nasional tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penjabaran RPJMD dituangkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang akan dijadikan pedoman Renja PD. Renja PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Pasal 27 Ayat 1 menerangkan bahwa SKPD menyusun Renja-SKPD, selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD 2017-2022, mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Rancangan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan persiapan penyusunan Renja BKPSDMD yang meliputi:

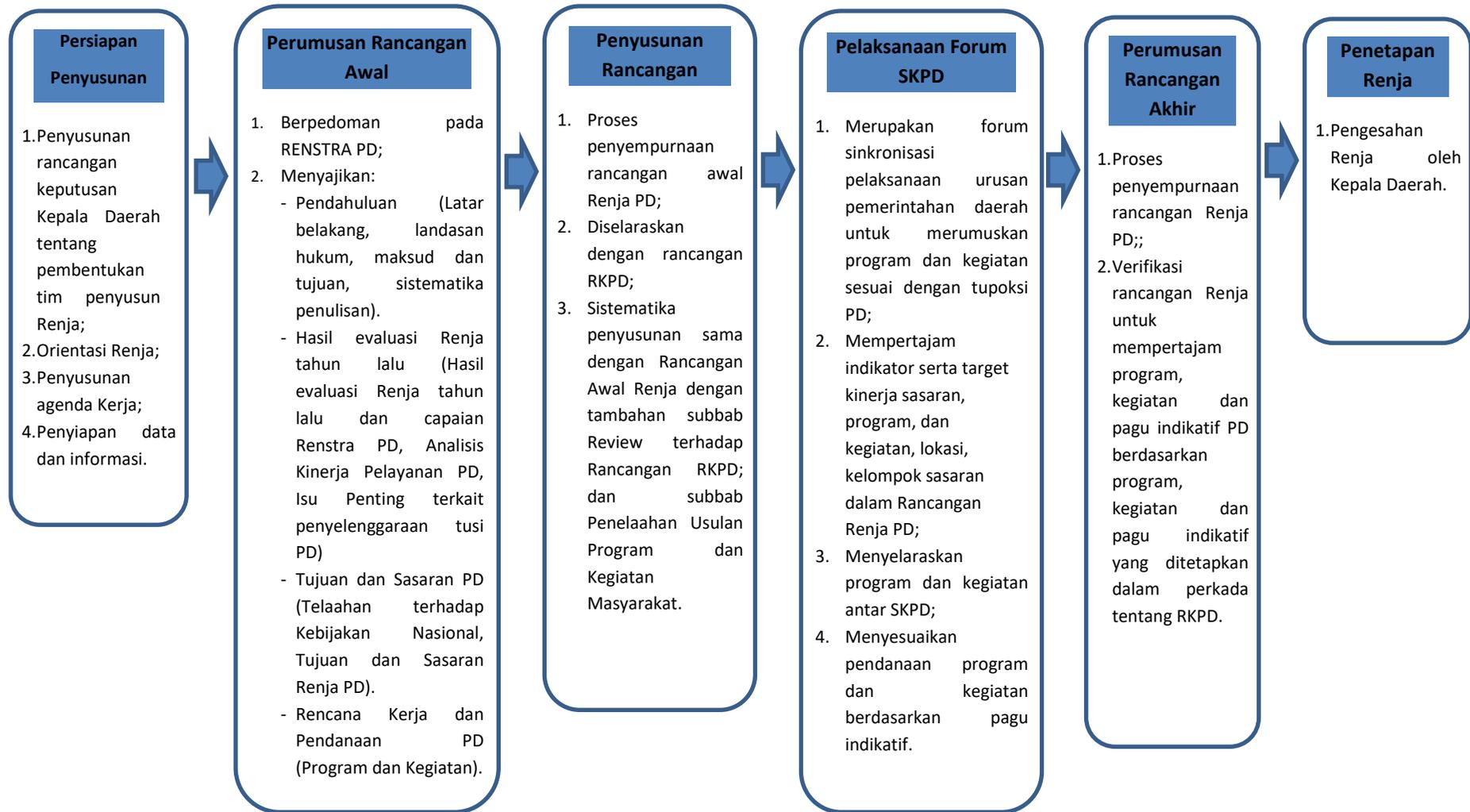
1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja BKPSDMD;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja BKPSMD;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja BKPSDMD; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Secara keseluruhan proses penyusunan Renja meliputi beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Perumusan rancangan awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan Renja dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Kerja BKPSDMD yang telah diverifikasi oleh Bappeda dan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDMD pada Tahun Anggaran 2021. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)



1.2. Landasan Hukum

Dasar dalam penyusunan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
 18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 19. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebagai upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. untuk menjabarkan Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 ke dalam dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
2. untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu sekaligus memperkirakan realisasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.
3. mewujudkan Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rancangan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Didalamnya memuat subbab tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020) mengacu pada APBD tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Bab II ini juga dilengkapi dengan beberapa subbab yaitu mengenai hasil review terhadap rancangan RKPD; dan hasil telaah usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Bab ini berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2021.

BAB V Penutup.

Bab ini berisikan catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dari BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2019, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 4 (empat) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan. Anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2019 sebesar Rp19.220.969.931,00 dengan realisasi sebesar Rp15.626.091.271,00 atau 81,30%. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung tahun 2019 sebesar Rp23.283.227.324,00. dengan realisasi sebesar Rp21.188.559.727,00 atau 91,00%. Total realisasi secara keseluruhan Belanja BKPSDMD tahun anggaran 2019 yakni 86,61% dengan realisasi fisik sebesar 98,90%. Adapun capaian realisasi kinerja (capaian *outcome* program dan *output* kegiatan) pada angka 92,08% berarti realisasi kinerja diatas interval 91%-100% yang merupakan kriteria penilaian kinerja "SANGAT TINGGI".

Dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran terlihat dari perbandingan antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik sebesar 86,61 : 98,90 dengan rasio sebesar 8 : 9 dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp5.689.546.257,00.

Berikut ini rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pencapaian Renstra BKPSDMD sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan
Pencapaian Renstra BKPSDMD s.d. Tahun 2020 (tahun berjalan)*
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lembar Ke : 1 dari 7

Kode	URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	Bidang Urusan Aparatur dan Pemerintahan									
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD	92%	66,95%	92%	92,58%	101%	95%	254,53%	2,68%
		Nilai LAKIP BKPSDMD	62,00	80,79	62,00	80,60	130%	65	226	3,48%
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	90%	95,78%	90%	96,00%	107%	91%	282,78%	3,11%
		Nilai Indeks Profesional ASN	68	90	68	70,18	103%	76	236	3,11%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai BKPSDMD yang Terlayani (Orang)	187	187	201	195	97%	187	569	3%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor (Paket)	26	7	11	11	100%	6	24	4%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara (Paket)	10	10	9	10	111%	10	30	3%
		Jumlah Mesin Genset Yang Terpelihara (Unit)	1	0	1	0	0%	1	1	1%
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Unit)	46	46	6	6	100%	7	59	8%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (Dokumen)	20	5	5	10	200%	5	20	4%
		Jumlah Dokumen (Dokumen)	10	2	2	2	100%	2	6	3%
	Penguatan Kelembagaan / Organisasi	Jumlah Laporan (Laporan)	6	2	1	1	100%	1	4	4%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya (Orang)	2835	538	1092	1457	133%	1207	3202	3%
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai BKPSDMD yang meningkat disiplinnya (Orang)	187	187	0	0	0%	0	187	~
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	45	7	9	9	100%	9	25	3%

Kode	URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	Persentase Pegawai ASN yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi	98%	67,85%	74%	113,53%	153%	83%	264,38%	3,19%
		Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi	98%	94,10%	87%	26,66%	31%	92%	212,76%	2,31%
		Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu	98%	94,92%	92%	119,60%	130%	93%	307,52%	3,31%
	Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan (Orang)	100	0	25	27	108%	25	52	2%
		Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang)	200	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN (Orang)	600	0	150	0	0%	150	150	1%
	Penyusunan Dokumen Manajemen Pola Karir	Jumlah Dokumen (Dokumen)	3	0	0	0	0%	1	1	1%
	Perencanaan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan ASN (Dokumen)	8	0	1	5	500%	2	7	4%
	Perencanaan dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan (Orang)	125	37	25	0	0%	0	37	~
		Jumlah Yang Lulus Seleksi CASN/ASN (Orang)	750	250	150	0	0%	0	250	~
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian (Dokumen)	20	2	1	0	0%	0	2	~
	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun (Orang)	4310	1177	900	1.303	145%	900	3380	4%
	Promosi dan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi (Orang)	1360	619	250	302	121%	270	1191	4%
		Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Talent Scouting (Orang)	800	0	0	0	0%	200	200	1%
		Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment (Orang)	400	0	300	179	60%	100	279	3%
		Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang)	316	40	0	0	0%	63	103	2%

Kode	URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu	98%	80,09%	65%	63,23%	97%	76%	219,32%	2,89%
		Persentase Akurasi Data dan informasi Kepegawaian	98%	106,13%	84%	84,00%	100%	90%	280,13%	3,11%
		Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang	0,09%	0,33%	0,15%	0,11%	73%	0,13%	0,57%	4,41%
		Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan	3,73%	3,17%	2,19%	10,00%	457%	2,21%	15,38%	6,96%
	Pembinaan ASN	Jumlah ASN Yang Dibina Rohaninya (Orang)	2.400	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit/Kejiwaan (Orang)	12	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang)	14.000	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Terbina (Orang)	27.631	0	6907	4633	67%	6909	11542	2%
		Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus)	28	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengembangan Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran Tingkat Nasional (Orang)	36	0	0	0	0%	18	18	1%
		Jumlah ASN Yang Dikembangkan Profesinya (Orang)	14.466	0	4.000	4077	102%	3.123	7200	2%
	Peningkatan Kesejahteraan ASN	Jumlah ASN Yang Sejahtera (Orang)	12.952	0	2.776	4537	163%	0	4537	~
		Jumlah ASN Yang Menerima Pembekalan Purnabhakti (Orang)	350	0	0	0	0%	70	70	1%
		Jumlah ASN Yang Berprestasi (Orang)	25	0	0	0	0%	5	5	1%
		Jumlah ASN Yang Menerima KGB (Orang)	7.500	0	0	0	0%	1.500	1500	1%
		Jumlah ASN Yang Menerima Satya Lencana (Orang)	500	0	0	0	0%	100	100	1%

Kode	URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang di monev SKP-nya (Orang)	3.500	2980	3.000	-	0%	3.500	6480	2%
		Jumlah Dokumen (Dokumen)	1	1	0	-	0%	0	1	~
		Jumlah Aplikasi Kinerja yang dibangun / dikembangkan (Aplikasi)	5	0	1	-	0%	1	1	1%
		Jumlah Rapergub Tunjangan Kinerja yang dirancang (Rapergub)	1	0	0	-	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Memiliki Kinerja (SKP) Baik (Orang)	3.500	0	0	-	0%	3.100	3100	1%
	Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN Yang mengikuti Workshop (Orang)	304	0	0	-	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit / Kejiwaan (Orang)	15	1	3	0	0%	0	1	~
		Jumlah ASN yang diverifikasi/divalidasi (Orang)	3.000	3000	3000	0	0%	0	3000	~
		Jumlah ASN yang diperiksa Narkoba (Orang)	6.900	0	500	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Dibina Pernikahan/Perceraian (Orang)	10	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Regulasi Kepegawaian (Dokumen)	15	4	0	0	0%	0	4	~
		Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang)	5.000	3309	2000	0	0%	0	3309	~
	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus)	30	10	7	0	0%	0	10	~	

Kode	URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	Jumlah Arsip Kepegawaian (Arsip)	4.500	4500	0	0	0%	0	4500	~
		Jumlah ASN Yang Diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir (Orang)	50	5	0	0	0%	0	5	~
		Jumlah Data Kepegawaian Yang Diupdate (Data)	8.500	8500	0	0	0%	0	8500	~
		Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK (Buku)	1.400	200	3	3	100%	3	206	69%
		Jumlah Artikel, Konten, Terjemahan (Artikel/terjemahan/konten)	1.750	150	0	0	0%	0	150	~
		Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dibangun/dikembangkan (Aplikasi)	20	5	0	0	0%	0	5	~
		Jumlah ID Card (Buah)	11.000	2700	0	0	0%	4000	6700	2%
	Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan (Kartu)	1.000	20	0	0	0%	250	270	1%	
	Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN	Jumlah ASN yang menerima KGB (Orang)	12.748	1524	0	0	0%	0	1524	~
		Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG (Orang)	500	20	0	0	0%	0	20	~
		Jumlah Kegiatan Bakti Sosial KORPRI (Kegiatan)	20	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi (Dokumen)	7	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Atlet ASN Yang Mengikuti Kejuaraan KORPRI antar Instansi Pemprov / PORNAS (Orang)	2.940	0	3500	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Purnabakti (Orang)	465	64	0	0	0%	0	64	~
		Jumlah ASN yang dibina rohaninya (Orang)	8.000	580	800	0	0%	0	580	~
		Jumlah ASN penerima Satya Lencana (Orang)	500	168	100	0	0%	0	168	~
		Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran (Orang)	33	14	0	0	0%	0	14	~
		Jumlah ASN berprestasi (Orang)	23	3	5	0	0%	0	3	~

Kode	URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial	100%	100,19%	96%	96,00%	100%	97%	293,19%	3,02%
		Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional	97%	18,80%	42%	34,98%	83%	60%	113,78%	1,90%
		Nilai Akreditasi Diklat	81	79,34	81	85,88	106%	81	246	3,04%
		Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya	52,80%	37,00%	39,90%	25,33%	63%	41,90%	104,23%	2,49%
	Ujian Dinas dan Seleksi Diklatpim III dan IV	Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas (Orang)	410	0	140	194	139%	0	194	~
		Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Diklatpim III dan IV (Orang)	400	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengukuran dan Pemetaan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Sertifikasi (Orang)	1.000	0	0	0	0%	40	40	1%
	Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	Jumlah ASN Yang Lulus Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (Orang)	320	0	0	0	0%	80	80	1%
		Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan (Orang)	720	80	40	40	100%	80	200	3%
		Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar (Orang)	600	80	360	343	95%	0	423	~
	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional (Orang)	4880	869	660	1077	163%	800	2746	3%
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek Melalui Jalur Kontribusi (Orang)	120	145	0	0	0%	0	145	~
		Jumlah ASN yang mengikuti magang (Orang)	4	0	0	0	0%	0	0	0%
	Peningkatan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing (Orang)	35	39	40	34	85%	26	99	4%
		Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa (Orang)	152	0	0	0	0%	0	0	0%
	Peningkatan Mutu Kediklatan	Nilai akreditasi diklat (Nilai)	81	71	0	0	0%	81	152	2%
		Jumlah Dokumen (Dokumen)	15	3	2	2	100%	3	8	3%

Kode	URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	PROGRAM PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN	Prosentase ASN Yang Memiliki Profil Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian	60%	30,68%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	30,68%	~
	Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur	Jumlah ASN yang lulus seleksi Talent Scouting (Orang)	900	85	50	0	0%	0	85	~
		Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas Tingkat I dan II (Orang)	400	0	50	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN yang Mengikuti Assesment (Orang)	1200	303	300	0	0%	0	303	~
		Jumlah ASN Yang Dipetakan Rekam Jejaknya (Orang)	800	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi PIM III dan IV (Orang)	400	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Mengikuti Roadshow Penilaian Kompetensi ASN (Orang)	14	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah ASN Yang Dianalisa Kebutuhan Uji Kompetensinya (Orang)	34	0	0	0	0%	0	0	0%
		Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian dan pemetaan Kompetensi ASN (Laporan)	4	0	0	0	0%	0	0	0%

Sebuah Program/kegiatan dapat terdiri dari beberapa indikator kinerja, dimana target-target indikator kinerja dalam sebuah program/kegiatan realisasi capaiannya dapat terpenuhi, atau melebihi target, ataupun tidak tercapai. Berikut uraian hasil analisis evaluasi Renja sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. diatas.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kegiatan : Jumlah pegawai BKPSDMD yang terlayani dengan target 201 Orang, realisasi 195 Orang.

B. Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan

Indikator Program : Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formal dengan target 87%, realisasi 26,66%.

- Kegiatan Promosi dan Mutasi ASN

Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang mengikuti Asessment dengan target 300 orang, terealisasi 179 orang.

C. Program Peningkatan Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi, dan Kesejahteraan ASN

Indikator Program : Persentase ASN yang SKP-nya Dinilai Tepat Waktu dengan target 65%, terealisasi 63,23%.

- Kegiatan Pembinaan ASN

Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang Terbina dengan target 6907 orang, terealisasi 4633 orang.

D. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN

d.1. Indikator Program : Persentase Pegawai ASN yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional dengan target 42% terealisasi 34,98%.

d.2. Indikator Program : Persentase Pegawai ASN yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya dengan target 39,90% terealisasi 25,33%.

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial

Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar dengan target 360 orang terealisasi 343 orang.

- Kegiatan Pendidikan Formal

Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing dengan target 40 orang terealisasi 34 orang.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa kegiatan yang telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

a.1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Indikator kegiatan : Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dengan target 11 paket terealisasi 11 paket.
- Indikator kegiatan : Jumlah Mesin Genset yang Terpelihara dengan target 1 unit teralisasi 1 unit.
- Indikator kegiatan : Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan target 6 unit terealisasi 6 unit.

a.2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Jumlah Dokumen dengan target 2 terealisasi 2 dokumen.

a.3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan/Organisasi

Indikator kegiatan : Jumlah laporan dengan target 1 terealisasi 1 laporan.

a.4. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Jumlah laporan dengan target 1 teralisasi 1 laporan.

B. Program Peningkatan Penilaian Kinerja, Disiplin, Infromasi, dan Kesejahteraan ASN

Indikator Program : Persentase Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian dengan target 84% terealisasi 84%.

- Kegiatan Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database/Arsip Kepegawaian

Indikator kegiatan : Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK dengan target 3 buku terealisasi 3 buku.

C. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN

Indikator Program : Persentase Pegawai ASN yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial dengan target 96% terealisasi 96%.

c.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial

Indikator Kegiatan : Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan dengan target 40 orang terealisasi 40 orang.

c.2. Kegiatan Peningkatan Mutu Kediklatan

Indikator kegiatan : Jumlah Dokumen dengan target 2 terealisasi 2 dokumen.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja yang melebihi target hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah.

- Indikator program : Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD dengan target 92% terealisasi 92,58%.
- Indikator program : Nilai LAKIP BKPSDMD dengan target 62% terealisasi 80,60%.
- Indikator program : Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi dengan target 90%, terealisasi 96%.
- Indikator program : Nilai Indeks Profesionalitas ASN dengan target 68 terealisasi 70,18.

a.1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan target 9 paket terealisasi 10 paket.

a.2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Responsif Gender dengan target 5 dokumen terealisasi 10 dokumen.

a.3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kegiatan : Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya dengan target 1092 orang terealisasi 1457 orang.

B. Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan

- Indikator program : Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dengan target 67% terealisasi 113,53%.
- Indikator program : Persentase ASN naik pangkat dan pensiun tepat waktu dengan target 92% terealisasi 119,60%.

- b.1. Kegiatan Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya
Indikator kegiatan : Jumlah peserta yang lulus seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan dengan target 25 orang terealisasi 27 orang.
- b.2. Kegiatan Perencanaan ASN
Indikator kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan ASN dengan target 1 dokumen teralisasi 5 dokumen.
- b.3. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun
Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang diusulkan naik pangkat dan pensiun dengan target 900 orang terealisasi 1.303 orang.
- b.4. Kegiatan Promosi dan Mutasi ASN
Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang dipromosi/Mutasi dengan target 250 orang terealisasi 302 orang.
- C. Program Peningkatan Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi, dan Kesejahteraan ASN
 - Indikator program : Persentase ASN yang menerima penghargaan dengan target 2,19%, realisasi 10,00%.
 - Indikator program : Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang dengan target 0,15% terealisasi 0,11%. (lebih sedikit kasus pelanggaran artinya kinerja dan disiplin lebih baik)
- c.1. Kegiatan Pengembangan Profesi ASN
Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang dikembangkan profesinya dengan target 4000 orang terealisasi 4077 orang.
- c.2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan ASN
Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang sejahtera dengan target 2776 orang terealisasi 4537 orang.
- D. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN
Indikator program : Nilai akreditasi diklat dengan target 81 terealisasi 85,88.
- d.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
Indikator kegiatan : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional dengan target 660 orang terealisasi 1077 orang.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Tidak semua kegiatan yang indikatornya tidak tercapai, penyebabnya karena ada faktor penghambat. Hal ini dikarenakan target indikator program/kegiatan pada dokumen Renja BKPSDMD tidak selalu sama dengan target indikator pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) BKPSDMD (umumnya target Renja lebih besar daripada target DPA karena DPA telah mengalami penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah). Namun, secara khusus, berdasarkan hasil evaluasi terhadap program/kegiatan tahun anggaran 2019 beberapa faktor penghambat dan pendorong yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

- 1). Jumlah pegawai BKPSDM yang terlayani tidak memenuhi target disebabkan karena adanya pegawai yang mutasi ke Perangkat Daerah lain.
- 2). Kegiatan assessment/seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi tidak dapat dilakukan apabila syarat minimal jumlah peserta yang mendaftar tidak terpenuhi.
- 3). Target CASN yang lulus seleksi tidak terealisasi karena Pelaksanaan tahap seleksi CASN/ASN tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/v205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019, yang mengatur tentang tahapan seleksi CASN/ASN akan selesai sampai dengan penetapan NIP tanggal 1 Mei s.d 15 Juni 2020.

B. Faktor Pendorong

- 1). Komitmen pimpinan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dengan rutin melaksanakan rapat pembahasan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan.
- 2). BKPSDMD memiliki SDM yang cukup memadai secara kualitas.
- 3). Suasana kerja kondusif; dan terjalin koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun lembaga pusat (BKN, LAN, Kemendagri).

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPSDMD.

Secara umum, implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan menyebabkan sisa anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BKPSDMD Tahun Anggaran 2019. Ini terbaca pada laporan realisasi keuangan triwulan IV Tahun Anggaran 201 yang menyatakan realisasi keuangan (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar 86,61% dan SILPA sebesar 13,39%. Namun, hal ini tidak terlalu mempengaruhi capaian target sasaran program Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 karena secara keseluruhan capaian kinerja Renstra BKPSDMD sampai dengan Tahun Anggaran Tahun 2019 mencapai 170,85%. (sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2019)

Lebih khusus, implikasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Implikasi tidak tercapainya target kinerja program.
 1. Perencanaan tidak maksimal.
 2. Anggaran tidak digunakan dengan optimal.
- b. Implikasi tercapainya target kinerja program
 1. Perencanaan tepat sasaran.
 2. Anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Jabatan administrator dan pengawas dapat terisi sesuai SOTK/kebutuhan.
 4. Kinerja meningkat.
 5. Terselenggaranya peningkatan kompetensi teknis dan fungsional bagi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Terselenggaranya pendidikan formal PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik penerima beasiswa APBD maupun beasiswa K/L/Sponsor.
 7. Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, promosi dan mutasi pegawai.
- c. Implikasi capaian kinerja program melebihi target.
 1. Terdapat PNS yang telah mengikuti Diklatpim namun belum menduduki jabatan.
 2. Jumlah PNS yang mendapatkan hak diklat 20 jpl/tahun meningkat.
 3. Kinerja meningkat.

4. Pemenuhan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.
5. Meningkatnya pelayanan publik yang diterima oleh ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian program/kegiatan Tahun Anggaran 2019 kegiatan yang mencapai target dan melebihi target justru lebih banyak daripada kegiatan yang tidak memenuhi target. Sebagaimana uraian diatas dapat diketahui bahwa penyebab tidak tercapainya target kegiatan diluar kendali organisasi BKPSDMD. Sehingga BKPSDMD akan semakin memperkuat koordinasi dan konsultasi terkait perkembangan kebijakan baik dari pusat maupun kepala daerah. Adapun kegiatan-kegiatan yang capaiannya melebihi target dipandang perlu mendapat perhatian sehingga dalam perencanaan di masa yang akan datang dapat ditetapkan target yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Penyesuaian perlu dilakukan untuk meminimalkan kesenjangan antara target kinerja dan realisasi capaian kinerja program/kegiatan.

Lebih jelas, kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai berikut:

- a. Terhadap implikasi tidak tercapainya kinerja program RENSTRA BKPSDMD.
 1. Penguatan kewenangan lembaga diklat sehingga peningkatan kompetensi ASN lebih maksimal.
 2. Penambahan anggaran.
- b. Terhadap implikasi tercapainya kinerja program RENSTRA BKPSDMD.
 1. Segera dilakukan evaluasi kinerja.
- c. Terhadap implikasi realisasi kinerja program RENSTRA BKPSDMD melebihi target.
 1. Melakukan evaluasi kinerja dan penyesuaian target capaian.
 2. Mengembangkan indikator kinerja agar cakupan layanan menjadi lebih luas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

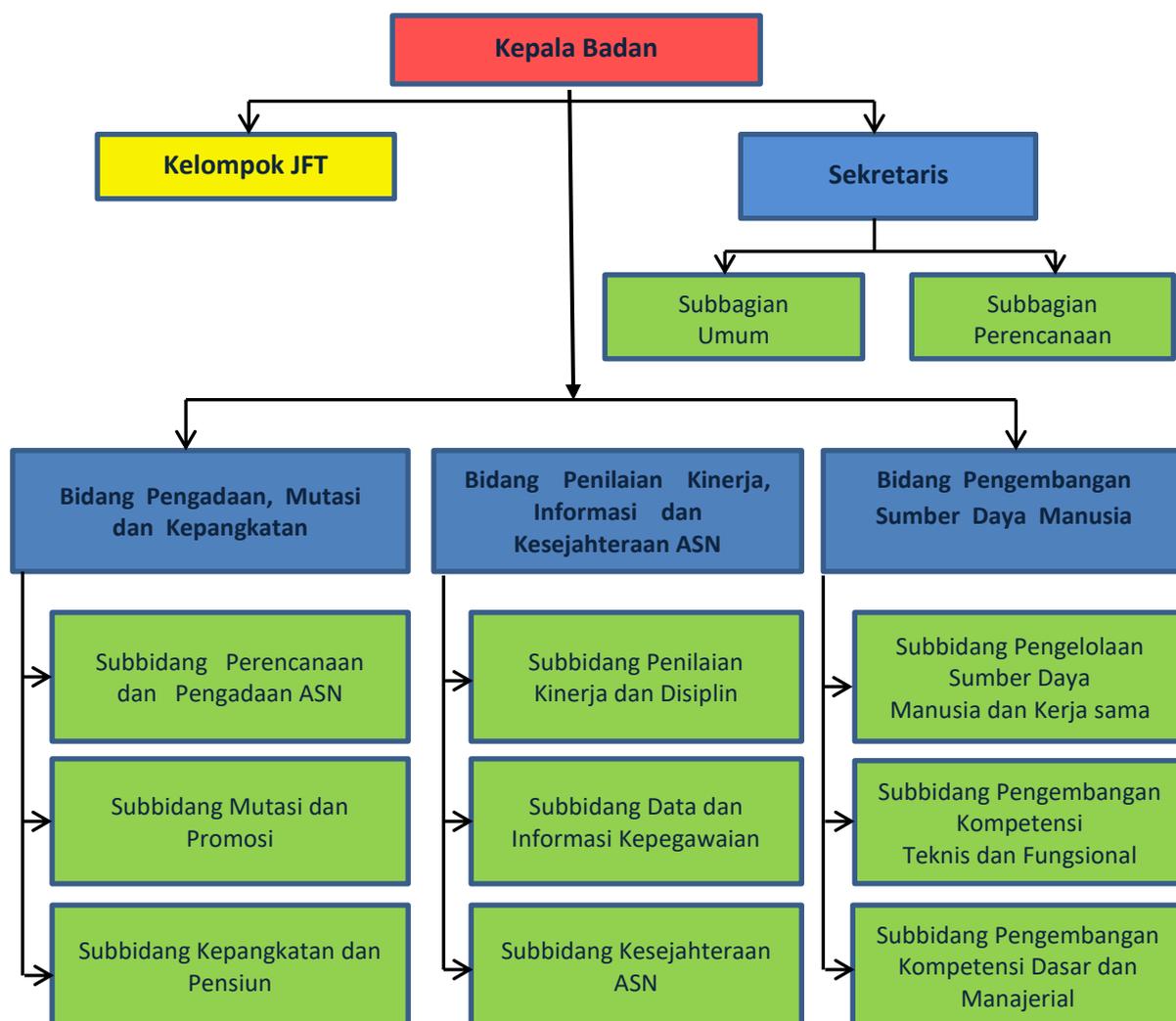
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan ASN;
 2. Subbidang Mutasi dan Promosi;

3. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.
- d. Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN, membawahkan:
 1. Subbidang Penilaian Kinerja dan Disiplin;
 2. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian;
 3. Subbidang Kesejahteraan ASN.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan:
 1. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama;
 2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2019, BKPSDMD didukung pegawai sebanyak 106 (seratus enam) orang. Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin Pertanggal 31 Desember 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JABATAN		
		Laki-Laki	Perempuan	STRUKTURAL	JFU	JFT
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	59	47	15	44	47
TOTAL		106		106		

Tabel 2.3.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Pertanggal 31 Desember 2019

No.	INSTANSI	TINGKAT PENDIDIKAN										GOLONGAN			
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	25	50	6	12	0	0	11	0	0	21	70	15	0
TOTAL		2	25	50	6	12	0	0	11	0	0	21	70	15	0
106											106				

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja BKPSDMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis BKPSDMD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Indikator Kinerja Utama BKPSDMD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan	Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan	52%	61%	70%	80%	89%
			Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik	56%	65%	74%	83%	93%

Realisasi Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel di atas dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Formulasi Penghitungan Capaian Realisasi Target IKU

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(2)	(3)
1	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang Berkompeten}}{\text{Jumlah Pegawai ASN Provinsi}} \times 100\%$
2	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik	$\frac{\text{Jumlah ASN yang Berkinerja Baik}}{\text{Jumlah Pegawai ASN Provinsi}} \times 100\%$

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan teknik penghitungan realisasi capaian IKU BKPSDM yaitu :

1. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan.
Capaian ini dapat dihitung melalui pengukuran indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran tersebut dapat diinventarisir jumlah ASN yang memenuhi kompetensi yang akan dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik.
Capaian ini sementara dapat dihitung secara manual melalui capaian kinerja individu melalui nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Namun kedepan dapat dihitung melalui pemanfaatan teknologi penerapan tunjangan kinerja berbasis kelas jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah ASN yang capaian kinerja berkategori baik dikurangi dengan Jumlah ASN yang mendapat hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 4 (empat) program yang terdiri dari:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah;
2. Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
3. Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi, dan Kesejahteraan ASN; dan
4. Program Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara.

Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2019 (Thn n-2)	2020 (Thn n-1)	2021 (Thn n)	2022 (Thn n+1)	2019 (Thn n-2)	2020 (Thn n-1)	2021 (Thn n)	2022 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan		Meningkatnya Kompetensi Aparatur	61%	70%	80%	89%	52,88%		80%	89%	Realisasi Capaian Tahun 2020 belum dapat diketahui
2	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik		Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	65%	74%	83%	93%	63,81%		83%	93%	

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Identifikasi permasalahan dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah sebagai strategi untuk mengetahui isu strategis dalam pelaksanaan tupoksi BKPSDMD, sekaligus meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang dalam mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman.

Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan, tetapi merupakan kebutuhan dalam perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk **mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia pada Tahun 2025**. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, salah satunya dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di suatu instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditentukan oleh kualitas ASN yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Kualitas ASN dapat dilihat melalui kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing ASN. Agar kualitas ASN dapat terjaga dan meningkat, perlu dilakukan pengelolaan kompetensi pegawai melalui peningkatan kompetensi secara sistematis dan berkesinambungan.

2.3.1. Sinergi Program Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 mengangkat tema **Meningkatkan Industri, pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung Oleh SDM dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Berkualitas**. Hal ini sejalan dengan Skala prioritas pembangunan tahap ke-4 RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 yaitu percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Ada 3 (tiga) prioritas nasional yang akan menjadi fokus Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, yaitu:

- 1). Pembangunan di sektor industri;
- 2). Pembangunan di sektor pariwisata; dan
- 3). Investasi.

Sementara itu, pembangunan sumber daya manusia direncanakan akan berlangsung besar-besaran. Hal ini dilakukan dengan alasan karena negara tidak bisa terus menerus bergantung kepada kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas. Kunci untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pada tahap ke-III (2017-2022) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 yaitu **Pembangunan Ekonomi dan Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM.**

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih ditemukan beberapa permasalahan dan hambatan, sebagai berikut:

1). Penjaminan mutu kediklatan.

Kebijakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadikan lembaga Diklat BKPSDMD menjadi rujukan penyelenggaraan kediklatan di Wilayah Barat yang ditargetkan terwujud dalam 3 (tiga) tahun harus diawali dengan peningkatan dan penjaminan mutu kediklatan. Namun hal ini masih terhambat disebabkan lembaga pemerintah penyelenggara kediklatan TIDAK MANDIRI. Penggabungan unit kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Sekretariat KORPRI mengakibatkan kewenangan pelaksanaan fungsi dan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi terbatas.

2). Kedisiplinan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal

Banyak upaya untuk mendisiplinkan PNS tidak diakomodir dan program tunjangan kinerja (Tukin) yang telah dimulai pada tahun 2018 belum optimal sehingga masih membutuhkan pengembangan.

4). Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi.

Beberapa aplikasi kepegawaian masih belum optimal sehingga administrasi masih banyak menggunakan kertas. Dengan aplikasi kepegawaian yang lebih optimal, diharapkan program *paperless* dapat mendorong pencapaian reformasi birokrasi dan penataan arsip. Saat ini juga aplikasi masih bersifat sektoral belum terintegrasi dengan baik. Banyaknya aplikasi yang harus ditangani dan diremajakan berdampak pada besarnya sumber daya (manusia, waktu, anggaran) yang harus dikeluarkan setiap tahun.

5). Belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun.

Sejak lembaga pelayanan KORPRI bergabung dengan lembaga pelayanan kediklatan dan kepegawaian dalam 1 (satu) unit kerja BKPSDMD, program/kegiatan pembinaan KORPRI hampir tidak mendapat peluang dari segi penganggaran. Padahal anggota KORPRI adalah seluruh ASN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa program/kegiatan pembinaan seperti bakti sosial KORPRI, bimbingan teknis bagi anggota yang memasuki masa pensiun, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan.

6). Belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi BKPSDMD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sedikit banyak dapat berpengaruh dalam pencapaian visi misi kepala daerah, khususnya keberhasilan Misi ke-5 yaitu **meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**. Apabila permasalahan tidak diatasi dengan baik, capaian Misi ke-5 tersebut akan terhambat. Dengan peningkatan kualitas sarana prasarana kediklatan maupun pelayanan, diharapkan akan seiring sejalan dengan peningkatan kemampuan BKPSDMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kediklatan dan administrasi kepegawaian.

Demikian juga dengan pencapaian program nasional, khususnya terkait capaian target indikator nasional : Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Dalam pengukuran nilai IP ASN, terdapat 4 komponen yakni Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja. Ke-empat komponen tersebut menjadi tanggung jawab BKPSDMD dalam upaya merealisasikannya sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDMD. Oleh sebab itu, dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik itu dari segi pendanaan maupun regulasi sangat dibutuhkan guna peningkatan kualitas pelayanan BKPSDMD dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dalam upaya pencapaian target nasional.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDMD

Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDMD yakni sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1). Tuntutan pelayanan yang lebih baik;
- 2). Keinginan Kepala Daerah untuk menjadi yang terdepan dan rujukan penyelenggaraan kediklatan di wilayah barat Indonesia.

b. Peluang

- 1). *Human Capital Management (HCM)* Aparatur Sipil Negara
- 2). SMART ASN (ASN yang memiliki karakteristik berwawasan global, menguasai teknologi dan informasi serta bahasa, memiliki kemampuan jejaring atau *networking* tinggi dengan kemampuan *skill multitasking* yang proporsional).
- 3). Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- 4). Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024.
- 5). Prioritas Pusat dalam pengembangan kompetensi ASN berupa kebijakan pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah **sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah.**

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDMD yang akan dituangkan ke dalam usulan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah. program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Proses review ini dilakukan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa analisis kebutuhan BKPSDMD dalam Renja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis BKPSDMD dan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil review Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lembar Ke : 1 dari 10

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Sakip PD	85	Rp 325.753.165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Sakip PD	85	Rp 325.753.165	
			survey kepuasan pelayanan internal	95	Rp 28.982.512.906			survey kepuasan pelayanan internal	95	Rp 28.982.512.906	
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	9	Rp 325.753.165	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	9	Rp 325.753.165	
	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2	Rp 135.753.165	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2	Rp 135.753.165	
	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pk.Pinang	Jumlah RKA/DPA yang tersusun	4	Rp 65.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pk.Pinang	Jumlah RKA/DPA yang tersusun	4	Rp 65.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4	Rp 65.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4	Rp 65.000.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3	Rp 60.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3	Rp 60.000.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan	Pk.Pinang	Survey kepuasan pelayanan keuangan	95	Rp 18.209.412.906	Kegiatan Administrasi Keuangan	Pk.Pinang	Survey kepuasan pelayanan keuangan	95	Rp 18.209.412.906	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk.Pinang	jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	107	Rp 18.139.412.906	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk.Pinang	jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	107	Rp 18.139.412.906	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan	2	Rp 6.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan	2	Rp 6.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pk.Pinang	Jumlah laporan keuangan bulanan Semester	2	Rp 34.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pk.Pinang	Jumlah laporan keuangan bulanan Semester	2	Rp 34.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pk.Pinang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pk.Pinang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	Rp 30.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Kegiatan Administrasi Umum	Pk.Pinang	survey kepuasan pelayanan umum	95	Rp 10.429.800.000	Kegiatan Administrasi Umum	Pk.Pinang	survey kepuasan pelayanan umum	95	Rp 10.429.800.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pk.Pinang	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	2	Rp 9.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pk.Pinang	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	2	Rp 9.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Materai	2500	Rp 15.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Materai	2500	Rp 15.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk.Pinang	Jumlah tagihan listrik	12	Rp 629.790.323	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk.Pinang	Jumlah tagihan listrik	12	Rp 629.790.323	
		Pk.Pinang	Jumlah tagihan komunikasi	12	Rp 24.000.000		Pk.Pinang	Jumlah tagihan komunikasi	12	Rp 24.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah tagihan Air	12	Rp 60.000.000		Pk.Pinang	Jumlah tagihan Air	12	Rp 60.000.000	
		Pk.Pinang	jumlah tagihan tv kabel	12	Rp 14.400.000		Pk.Pinang	jumlah tagihan tv kabel	12	Rp 14.400.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk.Pinang	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	12	Rp 452.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk.Pinang	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	12	Rp 452.400.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pk.Pinang	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7	Rp 12.150.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pk.Pinang	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7	Rp 12.150.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Tenaga Supir	1	Rp 37.700.000		Pk.Pinang	Jumlah Tenaga Supir	1	Rp 37.700.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pk.Pinang	Jumlah pengelola administrasi keuangan	28	Rp 227.520.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pk.Pinang	Jumlah pengelola administrasi keuangan	28	Rp 227.520.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Pramubakti	28	Rp 1.055.600.000		Pk.Pinang	Jumlah Pramubakti	28	Rp 1.055.600.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pk.Pinang	Jumlah tenaga kebersihan	40	Rp 1.508.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pk.Pinang	Jumlah tenaga kebersihan	40	Rp 1.508.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor	10	Rp 180.000.000		Pk.Pinang	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor	10	Rp 180.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pk.Pinang	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20	Rp 380.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pk.Pinang	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20	Rp 380.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pk.Pinang	jumlah jenis ATK yang dibeli	5	Rp 140.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pk.Pinang	jumlah jenis ATK yang dibeli	5	Rp 140.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pk.Pinang	jumlah barang cetak	2	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pk.Pinang	jumlah barang cetak	2	Rp 100.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah penggandaan	200.000	Rp 60.000.000		Pk.Pinang	Jumlah penggandaan	200.000	Rp 60.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk.Pinang	Jumlah komponen instalasi listrik	30	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk.Pinang	Jumlah komponen instalasi listrik	30	Rp 100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk.Pinang	jumlah Jenis peralatan kantor	10	Rp 1.929.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk.Pinang	jumlah Jenis peralatan kantor	10	Rp 1.929.000.000	
		Pk.Pinang	jumlah jenis perlengkapan kantor	5	Rp 599.000.000		Pk.Pinang	jumlah jenis perlengkapan kantor	5	Rp 599.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pk.Pinang	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	4	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pk.Pinang	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	4	Rp 30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk.Pinang	jumlah bahan logistik kantor	7	Rp 94.380.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk.Pinang	jumlah bahan logistik kantor	7	Rp 94.380.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pk.Pinang	Jumlah makan dan minum Tamu	24	Rp 180.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pk.Pinang	Jumlah makan dan minum Tamu	24	Rp 180.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah makan dan minum rapat	48	Rp 189.884.677		Pk.Pinang	Jumlah makan dan minum rapat	48	Rp 189.884.677	
	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pk.Pinang	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36	Rp 800.000.000	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pk.Pinang	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36	Rp 800.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36	Rp 400.000.000		Pk.Pinang	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36	Rp 400.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pk.Pinang	jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	Rp 500.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pk.Pinang	jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	Rp 500.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pk.Pinang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7	Rp 114.095.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pk.Pinang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7	Rp 114.095.000	
		Pk.Pinang	Jumlah BBM kendaraan	8.520	Rp 83.880.000		Pk.Pinang	Jumlah BBM kendaraan	8.520	Rp 83.880.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pk.Pinang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10	Rp 480.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pk.Pinang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10	Rp 480.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah BBM Genset	2.000	Rp 24.000.000		Pk.Pinang	Jumlah BBM Genset	2.000	Rp 24.000.000	
4	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pk.Pinang	survey kepuasan pelayanan kepegawaian	95	Rp 343.300.000	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pk.Pinang	survey kepuasan pelayanan kepegawaian	95	Rp 343.300.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pk.Pinang	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	295	Rp 206.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pk.Pinang	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	295	Rp 206.500.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri	Pk.Pinang	jumlah pakaian kopri yang diadakan	107	Rp 42.800.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri	Pk.Pinang	jumlah pakaian kopri yang diadakan	107	Rp 42.800.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pk.Pinang	jumlah pakaian khusus hari2 tertentu yang diadakan	188	Rp 94.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pk.Pinang	jumlah pakaian khusus hari2 tertentu yang diadakan	188	Rp 94.000.000	
	TOTAL PROGRAM I				Rp 29.308.266.071	TOTAL PROGRAM I				Rp 29.308.266.071	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi	73%	Rp 3.925.724.343	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi	73%	Rp 3.925.724.343	
			Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai	5%	Rp 1.597.313.680			Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai	5%	Rp 1.597.313.680	
			Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik	100%	Rp 691.427.606			Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik	100%	Rp 691.427.606	
1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pk.Pinang	Jumlah Data Pegawai yang dikelola	5587	Rp 297.143.442	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pk.Pinang	Jumlah Data Pegawai yang dikelola	5587	Rp 297.143.442	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pk.Pinang	Jumlah Sistem Informasi Yang Di Kelola	1	Rp 125.714.533	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pk.Pinang	Jumlah Sistem Informasi Yang Di Kelola	1	Rp 125.714.533	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Pk.Pinang	Jumlah Pegawai yang Dikelola Datanya	5587	Rp 171.428.909	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Pk.Pinang	Jumlah Pegawai yang Dikelola Datanya	5587	Rp 171.428.909	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang lulus CASN/IPDN	146 (121 CASN, 25 IPDN)	Rp 640.001.260	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang lulus CASN/IPDN	146 (121 CASN, 25 IPDN)	Rp 640.001.260	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	200	Rp 542.858.606		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	200	Rp 542.858.606	
		Pk.Pinang	Jumlah SK Pensiun dan Pangkat Yang Diterbitkan Tepat Waktu	1241	Rp 240.000.472		Pk.Pinang	Jumlah SK Pensiun dan Pangkat Yang Diterbitkan Tepat Waktu	1241	Rp 240.000.472	
	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	1	Rp 125.714.533	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	1	Rp 125.714.533	
		Pk.Pinang	Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi	146 (121 CASN, 25 IPDN)	Rp 414.286.727		Pk.Pinang	Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi	146 (121 CASN, 25 IPDN)	Rp 414.286.727	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian	Pk.Pinang	Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang dilakukan penataan	3650	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian	Pk.Pinang	Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang dilakukan penataan	3650	Rp 100.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi	200	Rp 542.858.606	Sub Kegiatan Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi	200	Rp 542.858.606	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Pk.Pinang	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun	91	Rp 114.285.939	Sub Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Pk.Pinang	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun	91	Rp 114.285.939	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pk.Pinang	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	1150	Rp 125.714.533	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pk.Pinang	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	1150	Rp 125.714.533	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN	Pk.Pinang	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	1	Rp 57.142.970	Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN	Pk.Pinang	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	1	Rp 57.142.970	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang dikembangkan profesinya	1	Rp 2.931.436.671		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang dikembangkan profesinya	1	Rp 2.931.436.671	
		Pk.Pinang	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	93%	Rp 91.428.751		Pk.Pinang	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	93%	Rp 91.428.751	
		Pk.Pinang	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	68%	Rp 108.571.642		Pk.Pinang	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	68%	Rp 108.571.642	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Pk.Pinang	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	1	Rp 57.142.970	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Pk.Pinang	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	1	Rp 57.142.970	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Profesi ASN	Pk.Pinang	MTQ KORPRI Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	0	Rp -	Sub Kegiatan Fasilitasi Profesi ASN	Pk.Pinang	MTQ KORPRI Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	0	Rp -	
		Pk.Pinang	Persemayaman bagi anggota KORPRI Prov. Kep. Bangka Belitung	27	Rp 137.143.127		Pk.Pinang	Persemayaman bagi anggota KORPRI Prov. Kep. Bangka Belitung	27	Rp 137.143.127	
		Pk.Pinang	Pekan Olahraga Antar Unit KORPRI Pemprov. Kep. Bangka Belitung	42 PD	Rp 342.857.818		Pk.Pinang	Pekan Olahraga Antar Unit KORPRI Pemprov. Kep. Bangka Belitung	42 PD	Rp 342.857.818	
		Pk.Pinang	PORPROV KORPRI IV se-Prov. Kep. Bangka Belitung	800	Rp 628.572.666		Pk.Pinang	PORPROV KORPRI IV se-Prov. Kep. Bangka Belitung	800	Rp 628.572.666	
		Pk.Pinang	PORNAS KORPRI XVI	125	Rp 1.085.716.424		Pk.Pinang	PORNAS KORPRI XVI	125	Rp 1.085.716.424	
		Pk.Pinang	Pemberian Bantuan Hukum/LKBH KORPRI	9	Rp 685.715.636		Pk.Pinang	Pemberian Bantuan Hukum/LKBH KORPRI	9	Rp 685.715.636	
		Pk.Pinang	Penyegaran Rohani KORPRI	600	Rp 51.431.000		Pk.Pinang	Penyegaran Rohani KORPRI	600	Rp 51.431.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Pk.Pinang	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	93%	Rp 91.428.751	Sub Kegiatan Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Pk.Pinang	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	93%	Rp 91.428.751	
		Pk.Pinang	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	68%	Rp 108.571.642		Pk.Pinang	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	68%	Rp 108.571.642	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Kegiatan Pengembangan Karir ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	200	Rp 257.142.970	Kegiatan Pengembangan Karir ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	200	Rp 257.142.970	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang menerima beasiswa	26	Rp 500.168.662		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang menerima beasiswa	26	Rp 500.168.662	
		Pk.Pinang	Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	1	Rp 57.142.970		Pk.Pinang	Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	1	Rp 57.142.970	
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi A	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	200	Rp 257.142.970	Sub Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	200	Rp 257.142.970	
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi A	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang menerima beasiswa	26	Rp 500.168.662	Sub Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang menerima beasiswa	26	Rp 500.168.662	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Pk.Pinang	Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	1	Rp 57.142.970	Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Pk.Pinang	Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	1	Rp 57.142.970	
5	Kegiatan Pembinaan ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang terbina	3708	Rp 194.283.770	Kegiatan Pembinaan ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang terbina	3708	Rp 194.283.770	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan perlindungan	107	Rp 297.143.443		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan perlindungan	107	Rp 297.143.443	
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang dibina disiplin dan rohaninya	3700	Rp 137.140.800	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang dibina disiplin dan rohaninya	3700	Rp 137.140.800	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pk.Pinang	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani	8	Rp 57.142.970	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pk.Pinang	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani	8	Rp 57.142.970	
	Sub Kegiatan Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pk.Pinang	Satya Lencana	100	Rp 68.571.564	Sub Kegiatan Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pk.Pinang	Satya Lencana	100	Rp 68.571.564	
		Pk.Pinang	ASN Berprestasi	7	Rp 228.571.879		Pk.Pinang	ASN Berprestasi	7	Rp 228.571.879	
	TOTAL PROGRAM II				Rp 6.214.465.629	TOTAL PROGRAM II				Rp 6.214.465.629	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang tersertifikasi	90%	Rp 624.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang tersertifikasi	90%	Rp 624.000.000	
			Nilai Akreditasi Diklat	81	Rp 705.000.000			Nilai Akreditasi Diklat	81	Rp 705.000.000	
			Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis	17,18%	Rp 2.251.600.000			Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis	17,18%	Rp 2.251.600.000	
			Persentase Pejabat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi	89,29%	Rp 722.500.000			Persentase Pejabat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi	89,29%	Rp 722.500.000	
			Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	26,06%	Rp 2.670.000.000			Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	26,06%	Rp 2.670.000.000	
			Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi fungsional	63,46%	Rp 990.000.000			Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi fungsional	63,46%	Rp 990.000.000	
1	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang Tersertifikasi	90	Rp 624.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang Tersertifikasi	90	Rp 624.000.000	
		Pk.Pinang	Nilai Akreditasi Lembaga Pelatihan	81	Rp 290.000.000		Pk.Pinang	Nilai Akreditasi Lembaga Pelatihan	81	Rp 290.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah dokumen Sumber Belajar dan Pelaksanaan Kerjasama	18	Rp 415.000.000		Pk.Pinang	Jumlah dokumen Sumber Belajar dan Pelaksanaan Kerjasama	18	Rp 415.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	125	Rp 722.500.000		Pk.Pinang	Jumlah Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	125	Rp 722.500.000	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	240	Rp 2.670.000.000		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	240	Rp 2.670.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	165	Rp 990.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	165	Rp 990.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi	1	Rp 15.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi	1	Rp 15.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagaan	4	Rp 40.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagaan	4	Rp 40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah	1	Rp 35.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah	1	Rp 35.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Fungsional	6	Rp 150.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Fungsional	6	Rp 150.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	2	Rp 70.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	2	Rp 70.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pk.Pinang	Jumlah Pimpinan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi	80	Rp 265.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pk.Pinang	Jumlah Pimpinan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi	80	Rp 265.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang mengikuti pengembangan kompetensi	45	Rp 337.500.000		Pk.Pinang	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang mengikuti pengembangan kompetensi	45	Rp 337.500.000	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	80	Rp 1.300.000.000		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	80	Rp 1.300.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan	160	Rp 1.360.000.000		Pk.Pinang	Jumlah CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan	160	Rp 1.360.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi	165	Rp 825.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi	165	Rp 825.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Pk.Pinang	Laporan Operasional LSP PDN Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	1	Rp 59.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Pk.Pinang	Laporan Operasional LSP PDN Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	1	Rp 59.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang tersertifikasi	90	Rp 550.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang tersertifikasi	90	Rp 550.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Diklat	10	Rp 150.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Diklat	10	Rp 150.000.000	
		Pk.Pinang	Nilai Akreditasi Diklat	0	Rp -		Pk.Pinang	Nilai Akreditasi Diklat	0	Rp -	
		Pk.Pinang	Penerbitan Media Diklat/Profil Badan/Jurnal Badan	5	Rp 100.000.000		Pk.Pinang	Penerbitan Media Diklat/Profil Badan/Jurnal Badan	5	Rp 100.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Pasca Diklat	15	Rp 150.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Pasca Diklat	15	Rp 150.000.000	
		Pk.Pinang	Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	1	Rp 110.000.000		Pk.Pinang	Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	1	Rp 110.000.000	
		Pk.Pinang	Pengembangan Aplikasi Pelatihan	1	Rp 125.000.000		Pk.Pinang	Pengembangan Aplikasi Pelatihan	1	Rp 125.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Pk.Pinang	Laporan Hasil Kerjasama Antar Lembaga	1	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Pk.Pinang	Laporan Hasil Kerjasama Antar Lembaga	1	Rp 30.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	1	Rp 15.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	1	Rp 15.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	1	Rp 10.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	1	Rp 10.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1	Rp 15.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1	Rp 15.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Pk.Pinang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Umum dan Pilihan	640	Rp 1.510.800.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Pk.Pinang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Umum dan Pilihan	640	Rp 1.510.800.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi	200	Rp 465.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi	200	Rp 465.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	120	Rp 275.800.000		Pk.Pinang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	120	Rp 275.800.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum	Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	4	Rp 40.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum	Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	4	Rp 40.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	4	Rp 27.500.000		Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	4	Rp 27.500.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	2	Rp 20.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	2	Rp 20.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	2	Rp 20.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	2	Rp 20.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum	4	Rp 35.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum	4	Rp 35.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Pilihan	4	Rp 50.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Pilihan	4	Rp 50.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	3	Rp 45.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	3	Rp 45.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	2	Rp 30.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	2	Rp 30.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Umum	360	Rp 759.300.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Umum	360	Rp 759.300.000	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Pilihan	280	Rp 575.000.000		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Pilihan	280	Rp 575.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	200	Rp 388.000.000		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	200	Rp 388.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	120	Rp 213.800.000		Pk.Pinang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	120	Rp 213.800.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	1	Rp 12.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	1	Rp 12.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	1	Rp 12.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	1	Rp 12.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	1	Rp 12.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	1	Rp 12.000.000	
		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	1	Rp 12.000.000		Pk.Pinang	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	1	Rp 12.000.000	
	TOTAL PROGRAM III				Rp 7.963.100.000	TOTAL PROGRAM III				Rp 7.963.100.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat umum. Sasaran program/kegiatan BKPSDMD adalah Aparatur Sipil Negara. Khususnya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan umumnya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur. Namun pelayanan yang dimiliki BKPSDMD seperti fasilitas ruang pertemuan/aula, ruang belajar/kelas, penginapan/asrama/paviliun diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan memiliki anggaran masing-masing. Pemanfaatan fasilitas inilah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui BKPSDMD.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 BKPSDMD tidak dilakukan tahapan forum/rapat koordinasi teknis Perangkat Daerah dengan pertimbangan efisiensi anggaran, namun usulan program/kegiatan dari seluruh pihak masih dapat disampaikan dan dibahas melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain dalam kegiatan Forum Gabungan/Rakortek/Forum Konsultasi Publik/Pramusrenbang/Musrenbang.

Adapun usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan yang menjadi bahan pembahasan Renja tahun 2021, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Prog/Keg/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Kepegawaian Daerah	Prov. Kep.Babel	Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan formasi		a. Usulan : Formasi Sarjana Keperawatan Ners (S.Kep., Ners) diperbanyak untuk formasi di RS Umum Provinsi, RS Jiwa Daerah dan Institusi Kesehatan lainnva
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Prov. Kep.Babel	Jumlah ASN yang lulus Seleksi CASN/IPDN		b. Pengusul : STIKES Citra Delima Bangka Belitung
	Subkegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Prov. Kep.Babel	Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan formasi ASN		c. Diakomodir karena penyusunan Formasi disusun berdasarkan kebutuhan daerah
2	Program Kepegawaian Daerah	Prov. Kep.Babel	Persentase penempatan pegawai ASN sesuai kompetensi		a. Usulan 1 : Beasiswa S3 Usulan 2 : Peningkatan SDM Melalui Pendidikan Umum Dan Profesi Kedokteran Melalui Bantuan Beasiswa
	Kegiatan Pengembangan Karir ASN	Prov. Kep.Babel	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya		b. Pengusul 1 : STKIP MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG Pengusul 2 : Bappeda Kota Pangkalpinang
	Subkegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Prov. Kep.Babel	Jumlah ASN yang menerima beasiswa		c. Belum dapat diakomodir karena BKPSDMD memprioritaskan pengembangan kompetensi melalui jalur beasiswa bagi ASN Pemprov. Kep. Babel
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prov. Kep.Babel	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial		a. Usulan 1 : Menjalin kerjasama dalam bentuk kontribusi (PNPB) dengan Pemerintah Kab/Kota di lingkungan Prov. kep. bangka Belitung dalam pelaksanaan diklat structural PIM Tk. III dan Tk. IV bagi PNS yang telah memenuhi syarat di Kabupaten Bangka Usulan 2 : Peningkatan SDM Melalui Diklat Kepemimpinan Baik Struktural Dan Fungsional
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prov. Kep.Babel	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/prajabatan		b. Pengusul 1 : Bappeda Kabupaten Bangka Barat Pengusul 2 : Bappeda Kota Pangkalpinang
	Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prov. Kep.Babel	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan		c. Diakomodir karena Program/kegiatan dimaksud sudah ada dalam rancangan Renja BKPSDMD Tahun 2021

No.	Prog/Keg/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prov. Kep.Babel	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial/fungsional		a. Usulan : Memonitoring dan mengevaluasi kelayakan sarana prasarana yang dimiliki Kabupaten dalam pelaksanaan Diklat LATSAR bagi CPNS Daerah dan Diklat Struktural PIM Tk. IV bagi PNS daerah Kabupaten Bangka Barat
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prov. Kep.Babel	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Fungsional		b. Pengusul : Bappeda Kabupaten Bangka Barat
	Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prov. Kep.Babel	Jumlah laporan Monev Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan		c. Diakomodir karena Monitoring dan evaluasi kelayakan sarpras kab/kota terkait pelaksanaan LATSAR merupakan salah satu kewajiban lembaga kediklatan Provinsi sebagai lembaga pemberi rekomendasi
5	-	-	-		Usulan Pembangunan Gedung Asrama, Pembangunan Ruang Rapat dan Arsip, serta Pembangunan Server oleh BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat diakomodir karena tidak ada program/kegiatan dimaksud dalam Renja BKPSDMD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD



3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 akan menjadi penjabaran tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan, terutama oleh Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Penyusunan RKP dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

RKP 2021 mengusung tema **"Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Agar RKP 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024

menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Beberapa *Major Projects* yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan, antara lain: (i) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (ii) 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (iii) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (iv) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan (v) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, yaitu **"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"** dan Misi Kelima yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pembangunan Demokrasi** maka Rencana Kerja BKPSDMD tahun 2021 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni **Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas**, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: **"Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas Aparatur"**.

Pada pertengahan tahun 2018, BKN dan Kemenpan & RB bekerjasama melakukan penyesuaian pengukuran profesionalitas ASN dalam pendekatan merit, semula mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kompetensi (kualifikasi pendidikan, pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman);
2. Kinerja (Target dan Hasil Pekerjaan);
3. Kompensasi (Tingkat kebutuhan); dan
4. Disiplin (Tingkat Pelanggaran Disiplin).

Disesuaikan menjadi :

1. Kualifikasi (Pendidikan Formal)
2. Kompetensi (Diklat/Seminar, dll)
3. Kinerja (Standar Kinerja Pegawai); dan
4. Disiplin (Tingkat Pelanggaran Disiplin).

Ada 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur;

Salah satu kendala dalam menjadikan ASN yang profesional adalah tingginya gap kompetensi pegawai yang dilihat dari kesesuaian jabatan, kesesuaian tingkat pendidikan, kesesuaian pelatihan dengan jabatan, dan pengalaman jabatan. Dengan tingginya gap kompetensi pegawai tentu akan berdampak buruk pada pelayanan kepada masyarakat. Banyak pekerjaan akan terbengkalai dan tidak terspesialisasi sehingga pegawai sulit mengeluarkan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Akibatnya pegawai lebih banyak mengerjakan pekerjaan lain dibandingkan dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu menjadi tugas penting BKPSDM dalam mengelola ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar memiliki kesesuaian kompetensi. Semakin sesuai pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

2. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur;

Isu rendahnya disiplin dan kinerja ASN sudah merupakan isu sentral ASN. Lambannya pelayanan, banyaknya kasus indisipliner, KKN dan lain sebagainya. Tingginya gap capaian disiplin dan kinerja ini menjadi perhatian BKPSDM dalam mengevaluasi kembali capaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi penilaian kinerja saat ini sudah mulai diarahkan pada aspek dan metoda yang lebih terukur, mulai dari orientasi pelayanan, integritas, disiplin, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Dengan pertimbangan tingkat capaian kinerja ini sangat memungkinkan untuk memberlakukan *reward and punishment* kepada pegawai. Dengan semakin tingginya capaian kinerja pegawai maka gap disiplin dan kinerja akan semakin kecil dan akan menaikkan indeks Profesionalitas ASN yang pada akhirnya berpengaruh baik pada indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan diatas menjadi dasar rencana kinerja tahunan BKPSDMD sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Rencana Kinerja Tahunan
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan	Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan	80%	89%
	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik	83%	93%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dimana sasaran utama dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya kompetensi aparatur, dan, meningkatnya disiplin aparatur. Kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program (*outcome*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BKPSDMD dalam menyusun rencana kerja tahun 2021 sejalan dengan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimana dalam proses perubahan tersebut, dokumen Rencana Strategis BKPSDMD juga mengalami penyesuaian.

Program/kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis, 10 kegiatan dan 42 subkegiatan. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada penyusunan rancangan awal dan rancangan Renja telah disesuaikan pagu dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan total kebutuhan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebesar **Rp29.407.845.368,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)** yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Umum

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

- Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian

- Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian
- Sub Kegiatan Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN
- Sub Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)

- Sub Kegiatan Fasilitasi Profesi ASN
- Sub Kegiatan Pengembangan Penilaian Kinerja ASN

d. Kegiatan Pengembangan Karir ASN

- Sub Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN
- Sub Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN
- Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir

e. Kegiatan Pembinaan ASN

- Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
- Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Sub Kegiatan Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

- Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum
- Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Semula rencana program/kegiatan/subkegiatan BKPSDMD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RENJA tahun 2021 masih sesuai rencana yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis namun dalam tahapan pembahasan pascamusrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dan disertai dengan datangnya wabah virus CORONA yang menyebabkan penyakit COVID-19 melanda Indonesia dan seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 sampai dengan dokumen perencanaan tahunan ini dalam tahap proses perumusan rancangan akhir, jumlah korban terus bertambah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan instruksi bagi seluruh Kementerian/Lembaga di Pusat dan daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan *refocussing*/realokasi anggaran tahun berjalan (tahun 2020) sebagai upaya penanganan COVID-19 dan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Program penanganan dan pemulihan ekonomi dampak dari COVID-19 ini terus berlanjut hingga tahun 2021. *Refocussing*/realokasi anggaran ini berdampak kepada pagu indikatif seluruh perangkat daerah tahun 2021, mengalami penyesuaian kembali sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1.

4.2. Pendanaan

Penyelenggaraan program/kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan dukungan pendanaan yang telah disesuaikan dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah: BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lembar ke 1 dari 12

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
				TOTAL PAGU				Rp 29.407.845.368			Rp 39.137.749.102
5	03			URUSAN PENUNJANG	Rp 9.613.346.846			Rp 25.215.008.456			Rp 27.679.007.906
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip PD			Rp 17.915.500		85	Rp 125.000.000
					survey kepuasan pelayanan internal			Rp 25.197.092.956		95	Rp 27.554.007.906
5	03	01	1.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	Pk.Pinang	8	Rp 17.915.500	APBD	8	Rp 125.000.000
5	03	01	1.01	03 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	Pk.Pinang	4	Rp 8.915.500	APBD	4	Rp 65.000.000
5	03	01	1.01	05 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	Pk.Pinang	4	Rp 9.000.000	APBD	4	Rp 60.000.000
5	03	01	1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Survey kepuasan pelayanan keuangan	Pk.Pinang	95	Rp 19.794.498.522	APBD	99	Rp 18.592.898.229
5	03	01	1.02	01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	Pk.Pinang	107	Rp 19.794.498.522	APBD	107	Rp 18.592.898.229

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
5 03 01 1.03	Kegiatan Administrasi Umum	survey kepuasan pelayanan umum	Pk.Pinang	95	Rp 5.402.594.434	APBD	99	Rp 8.961.109.677
5 03 01 1.03 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Pk.Pinang	2	2.800.000	APBD	2	Rp 9.500.000
		Jumlah Materai	Pk.Pinang	1500	7.950.000	APBD	3000	Rp 18.000.000
		Jumlah Pramubakti	Pk.Pinang	28	Rp 1.055.600.000	APBD	28	Rp 1.055.600.000
5 03 01 1.03 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik	Pk.Pinang	12	Rp 660.000.000	APBD	12	Rp 650.000.000
		Jumlah tagihan komunikasi	Pk.Pinang	12	Rp 17.700.000	APBD	12	Rp 24.000.000
		Jumlah tagihan Air	Pk.Pinang	12	Rp 60.000.000	APBD	12	Rp 60.000.000
5 03 01 1.03 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	Pk.Pinang	12	Rp 452.400.000	APBD	12	Rp 452.400.000
5 03 01 1.03 06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pk.Pinang	7	Rp 8.250.000	APBD	7	Rp 12.150.000
		Jumlah Tenaga Supir	Pk.Pinang	1	Rp 37.700.000	APBD	1	Rp 37.700.000
5 03 01 1.03 07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	Pk.Pinang	14	Rp 137.520.000	APBD	28	Rp 227.520.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)						
5	03	01	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Pk.Pinang	40	Rp	1.508.000.000	APBD	40	Rp	1.508.000.000
						Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor	Pk.Pinang	10	Rp	120.000.000	APBD	10	Rp	360.000.000
5	03	01	1.03	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Pk.Pinang	20	Rp	146.937.206	APBD	20	Rp	760.000.000
5	03	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis ATK yang dibeli	Pk.Pinang	5	Rp	48.000.000	APBD	5	Rp	140.000.000
5	03	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak	Pk.Pinang	2	Rp	59.360.000	APBD	2	Rp	100.000.000
5	03	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Pk.Pinang	20	Rp	28.000.000	APBD	35	Rp	200.000.000
5	03	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	Pk.Pinang	7	Rp	28.000.000	APBD	7	Rp	94.380.000
5	03	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum Tamu	Pk.Pinang	10	Rp	36.000.000	APBD	24	Rp	180.000.000
						Jumlah makan dan minum rapat	Pk.Pinang	24	Rp	40.000.000	APBD	48	Rp	189.884.677

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)				
5	03	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pk.Pinang	20	Rp 249.784.994	APBD	36	Rp 800.000.000
						Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pk.Pinang	20	Rp 207.302.497	APBD	36	Rp 400.000.000
5	03	01	1.03	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pk.Pinang	3	Rp 274.876.587	APBD	3	Rp 980.000.000
5	03	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pk.Pinang	7	Rp 94.095.000	APBD	7	Rp 114.095.000
						Jumlah BBM kendaraan	Pk.Pinang	8.520	Rp 65.535.000	APBD	8.520	Rp 83.880.000
5	03	01	1.03	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pk.Pinang	10	Rp 48.762.996	APBD	10	Rp 480.000.000
						Jumlah BBM Genset	Pk.Pinang	2.000	Rp 8.020.154	APBD	2.000	Rp 24.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
5 03	KEPEGAWAIAN				Rp 2.532.629.720			Rp 5.317.941.196
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi		73%	Rp 1.026.414.152		73%	Rp 2.428.962.444
		Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai		5%	Rp 1.170.836.661		6%	Rp 2.189.610.348
		Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik		100%	Rp 335.378.907		100%	Rp 699.368.404
5 03 02 1.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Data Pegawai yang dikelola	Pk.Pinang	5469	Rp 211.950.728	APBD	5469	Rp 437.966.319
5 03 02 1.01 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Yang Di Kelola	Pk.Pinang	1	Rp 94.720.000	APBD	1	Rp 187.699.851
5 03 02 1.01 04	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Dikelola Datanya	Pk.Pinang	5469	Rp 117.230.728	APBD	5469	Rp 250.266.468
5 03 02 1.02	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang lulus CASN/IPDN	Pk.Pinang	146 (121 CASN, 25 IPDN)	Rp 315.463.424	APBD	139 (114 CASN, 25 IPDN)	Rp 875.932.637
		Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	Pk.Pinang	200	Rp 293.556.000	APBD	325	Rp 988.765.722
		Jumlah SK Pensiun dan Pangkat Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Pk.Pinang	1241	Rp 127.112.000	APBD	1272	Rp 375.399.702
5 03 02 1.02 01	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	Pk.Pinang	1	Rp 61.845.000	APBD	1	Rp 187.699.851
		Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi	Pk.Pinang	146 (121 CASN, 25 IPDN)	Rp 210.062.424	APBD	139 (114 CASN, 25 IPDN)	Rp 588.232.786

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
5 03 02 1.02 04	Sub Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun	Pk.Pinang	91	Rp 63.556.000	APBD	97	Rp 187.699.851
5 03 02 1.02 06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian	Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang dilakukan penataan	Pk.Pinang	3650	Rp 43.556.000	APBD	3660	Rp 100.000.000
5 03 02 1.02 08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi	Pk.Pinang	200	Rp 293.556.000	APBD	325	Rp 988.765.722
5 03 02 1.02 10	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	Pk.Pinang	1150	Rp 63.556.000	APBD	1175	Rp 187.699.851
5 03 02 1.03	Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	Pk.Pinang	1	Rp 50.000.000	APBD	1	Rp 125.133.234
		Jumlah ASN yang dikembangkan profesinya	Pk.Pinang	0	Rp 449.000.000	APBD	28	Rp 989.930.254
		Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	Pk.Pinang	93%	Rp 80.000.000	APBD	95%	Rp 131.389.896
		Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	Pk.Pinang	68%	Rp 85.779.449	APBD	80%	Rp 156.416.542

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
5 03 02 1.03 02	Sub Kegiatan Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	Pk.Pinang	93%	Rp 80.000.000	APBD	95%	Rp 131.389.896
		Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	Pk.Pinang	68%	Rp 85.779.449	APBD	80%	Rp 156.416.542
5 03 02 1.03 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	Pk.Pinang	1	Rp 50.000.000	APBD	1	Rp 125.133.234
5 03 02 1.03 05	Sub Kegiatan Fasilitasi Profesi ASN	Pemberian Bantuan Hukum/LKBH KORPRI	Pk.Pinang	5	Rp 399.000.000	APBD	10	Rp 938.499.254
		Penyegaran Rohani KORPRI	Pk.Pinang	600	Rp 50.000.000	APBD	600	Rp 51.431.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
5 03 02 1.04	Kegiatan Pengembangan Karir ASN	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	Pk.Pinang	200	Rp 250.000.000	APBD	350	Rp 325.000.000
		Jumlah ASN yang menerima beasiswa	Pk.Pinang	26	Rp 449.800.000	APBD	28	Rp 500.444.924
		Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	Pk.Pinang	1	Rp 50.368.661	APBD	0	Rp -
5 03 02 1.04 01	Sub Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi A	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	Pk.Pinang	200	Rp 250.000.000	APBD	350	Rp 325.000.000
		Jumlah ASN yang menerima beasiswa	Pk.Pinang	26	Rp 449.800.000	APBD	28	Rp 500.444.924
5 03 02 1.04 02	Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	Pk.Pinang	1	Rp 50.368.661	APBD	0	Rp -
5 03 02 1.05	Kegiatan Pembinaan ASN	Jumlah ASN yang terbina	Pk.Pinang	3708	Rp 129.599.458	APBD	3708	Rp 286.428.732
		Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan perlindungan	Pk.Pinang	107	Rp 40.000.000	APBD	107	Rp 125.133.234
5 03 02 1.05 01	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dibina disiplin dan rohaninya	Pk.Pinang	3700	Rp 77.456.488	APBD	3700	Rp 198.835.468
5 03 02 1.05 02	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani	Pk.Pinang	8	Rp 52.142.970	APBD	8	Rp 87.593.264
5 03 02 1.05 03	Sub Kegiatan Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Satya Lencana	Pk.Pinang	75	Rp 40.000.000	APBD	100	Rp 125.133.234

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
5 04 02 1.02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi	Pk.Pinang	25	Rp 125.000.000	APBD	140	Rp 676.000.000
5 04 02 1.02 04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Diklat	Pk.Pinang	2	Rp 40.000.000	APBD	6	Rp 200.000.000
		Penerbitan Media Diklat/Profil Badan/Jurnal Badan	Pk.Pinang	3	Rp 60.000.000	APBD	5	Rp 50.000.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Pasca Diklat	Pk.Pinang	2	Rp 40.000.000	APBD	10	Rp 250.000.000
		Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Pk.Pinang	1	Rp 40.000.000	APBD	1	Rp 110.000.000
		Pengembangan Aplikasi Pelatihan	Pk.Pinang	1	Rp 40.000.000	APBD	1	Rp 50.000.000
5 04 02 1.02 07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan	Pk.Pinang	120	Rp 825.777.017	APBD	80	Rp 1.500.000.000
5 04 02 1.02 08	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Pk.Pinang	1	Rp 20.000.000	APBD	1	Rp 15.000.000
5 04 02 1.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Umum dan Pilihan	Pk.Pinang	160	Rp 236.322.544	APBD	560	Rp 1.624.800.000
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi	Pk.Pinang	80	Rp 118.178.728	APBD	240	Rp 1.089.000.000
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	Pk.Pinang	80	Rp 114.928.903	APBD	120	Rp 576.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)						
5	04	02	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Pk.Pinang	1	Rp	6.831.000	APBD	6	Rp	75.000.000
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Pk.Pinang	1	Rp	6.831.000	APBD	6	Rp	75.500.000
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	Pk.Pinang	1	Rp	6.831.000	APBD	2	Rp	25.000.000
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	Pk.Pinang	1	Rp	6.831.000	APBD	2	Rp	25.000.000
5	04	02	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum	Pk.Pinang	1	Rp	6.348.228	APBD	8	Rp	70.000.000
						Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Pilihan	Pk.Pinang	1	Rp	6.313.316	APBD	7	Rp	85.000.000
						Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	Pk.Pinang	1	Rp	6.348.228	APBD	4	Rp	52.000.000
						Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	Pk.Pinang	1	Rp	3.098.228	APBD	3	Rp	39.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)						
5	04	02	1.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Umum	Pk.Pinang	80	Rp	99.502.000	APBD	280	Rp	720.300.000
						Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Pilihan	Pk.Pinang	80	Rp	99.502.000	APBD	280	Rp	575.000.000
						Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	Pk.Pinang	80	Rp	99.502.000	APBD	240	Rp	1.000.000.000
						Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	Pk.Pinang	80	Rp	99.502.175	APBD	200	Rp	500.000.000
5	04	02	1.01	04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Pk.Pinang	1	Rp	5.497.500	APBD	1	Rp	12.000.000
						Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Pk.Pinang	1	Rp	5.497.500	APBD	1	Rp	12.000.000
						Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	Pk.Pinang	1	Rp	5.497.500	APBD	1	Rp	12.000.000
						Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	Pk.Pinang	1	Rp	5.497.500	APBD	1	Rp	12.000.000

BAB V

PENUTUP



A. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara efektif dan efisien, disamping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2021.

Sebagai upaya penanganan isu strategis pembangunan tahun 2021 maka BKPSDMD memiliki program prioritas sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah; dan
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Kedua program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan 2020;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 dan 2020;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;
5. Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra BKPSDMD selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulanan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Pangkalpinang, Juni 2020

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. H. SAHIRMAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610815 199103 1 00



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka-Kelurahan Air Itam kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418

Telp. (0717)439314, 439315, 439500 Fax : (0717) 439316, Email : bkd@babelprov.go.id Website : bkd.babelprov.go.id